
Analisis Kebijakan Industrialisasi di Indonesia Mutakhir

Oleh Muchtar Ahmad

Abstract,

An image of no strategy of industrialization in Indonesia has stimulated this article, to discuss the contemporary industrial policy of Indonesia, especially post monetary and economy crises of 1998, which has been distort economic stability. The development of industrial policy and problems are analyzed, especially related to basic ideology, the goals and its achievement, in structural change and economic integration. With this basic step, an industrialization policy system propose, which is planning as the institutional coordination of policies because industrialization should be based on agriculture toward agroindustry progress as the foundation of industrialization toward manufacturing, by mean of productivity increasing, purchasing power strengthen and improvement agriculture technology. In turn a policy of industrialization will be the development of import substitution industry and by proper selection the export –drive industry will be developed base on the criteria of jobs creation and economic structure change

Keywords: Policy analysis, industrilialization

Pendahuluan

Sebagai alat dalam pengelolaan (*management*) maupun pengurusan (*governance*) pembangunan, kebijakan merupakan suatu hal yang penting. Dalam perekonomian yang sedang berkembang ke arah industrialisasi, maka kebijakan industri akan menentukan ke-berhasilannya. Kebijakan industri menyangkut keputusan pemerintah yang bijak berkenaan dengan upaya merubah secara bermakna adanya ketak-seimbangan antara sektor in-dustri dengan sektor ekonomi lainnya, berkaitan dengan sumbangan sektor pada pereko-nomian, angka pengangguran dan pendapatan per kepala. Langkah utama yang dilaku-kan di antaranya menyusun kebijakan dan perencanaan industrialisasi.

*) Staf pengajar pada Program Magister Sosiologi Konsentrasi Urban Studies Universitas Riau

Secara sederhana industrialisasi adalah suatu proses dan upaya meng-industri-kan suatu perekonomian, dalam

arti peran industri dalam perekonomian menjadi besar. Jadi industrialisasi pada hakikatnya ialah pembangunan perluasan kegiatan ekonomi yang terorganisir dengan maksud menghasilkan barang pabrik atau kilang secara massal. Industrialisasi mempunyai cirikhas oleh terjadinya transformasi dari suatu ekonomi pertanian primer menjadi suatu yang lebih terspesialisasi dan ekonomi padat modal. Transformasi seperti itu disebut Revolusi Industri di Eropa Barat dan Amerika Utara selama abad ke 18 dan ke 19 secara nyata telah meningkatkan kemakmuran bendawi (Heaton 1957). Oleh sebab itu, sejak berakhirnya depresi ekonomi 1929 terutama sejak Perang Dunia II, kebijakan pembangunan ekonomi suatu negara yang baru muncul diarahkan melalui industrialisasi. Kenyataannya banyak negara yang berhasil memajukan ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya (, seperti yang dialami oleh NIC (*New Industry Countries*) seperti Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, Singapura, dan belakangan ini juga China dan Brazil.

Menurut Syrquin dan Chenery (2002) dari pengamatannya terhadap pengalaman 30 tahun industrialisasi dunia pada lebih dari 100 ekonomi negara, walaupun pengalaman pembangunannya beragam macam baik rentang waktu maupun lintas negara, terdapat keseragaman di antara negara-negara itu; yakni gambaran utama transformasi struktural muncul secara jelas dan konsisten polanya dalam pertumbuhan ekonomi moderen di negara itu.

Akan tetapi tak dapat dinafikan banyak juga negara yang tak berhasil seperti negara yang berdasarkan perencanaan terpusat dari block sosialis-komunistis, dan negara berkembang yang bersifat diktator-militer seperti di beberapa negara Amerika Latin dan Afrika maupun Myanmar dan Indonesia pada masa orde baru, beberapa negara ASEAN selain Singapura dan Malaysia.

Makalah ini melaporkan kajian tentang kebijakan industri yang diambil pemerintah Indonesia mutakhir, terutama pada masa kabinet industri bersatu, sebagai suatu kajian evaluasi kebijakan yang sedang dijalankan.

Metodologi

Hasil dan Pembahasan

Selama masa sejak reformasi 1998 sampai dewasa ini, Indonesia memberi kesan tidak adanya kebijakan industri maupun strategi industri yang jelas. Hal itu juga dikemukakan oleh para pengamat ekonomi di berbagai media cetak dan elektronik. Selain itu juga tidak ada kebijakan mengantisipasi terjadinya deindustrialisasi. Hal itu ditandai antara lain oleh pindahnya industri dari Indonesia ke negara tetangga atau ASEAN lainnya, China dan Korea Selatan seperti Sony, Nike

Sebagai suatu kajian kebijakan, maka bahan yang disimak ialah peraturan dan ke-bijakan pemerintah berkaitan dengan industri pengolahan, dan hasil yang dicapai sebagai dasar untuk mengukur kemangkusan kebijakan industri tersebut. Sumber keluaran atau dampak suatu kebijakan diambil dari laporan resmi produktivitas industri dan berita pada media massa, yang mengungkapkan keluhan, kendala, dan harapan rasionalnya pada kebijakan maupun tentang keberhasilan industri yang dilaporkan baik berkenaan dengan pemasaran hasil industri, maupun berhasil mengeksport sebagai gambaran adanya daya saing dan memasuki globalisasi.

Analisis alasan teoritis dan sejarah, mengapa pemerintah ikut campur dengan berbagai kebijaksanaan yang luas cakupannya untuk memajukan pembangunan industri pada berbagai titik tindak lanjutan seperti memulai kegiatan industri baru; peragaman dasar industri, penyusunan ulang kelembagaan industri utama, dan memasuki sektor industri baru berteknologi tinggi seperti berazaskan ilmu-ilmu biologi, ICT, bahan kreatif dan lain-lain.

dan lain-lain. Terjadinya keresahan buruh dan diikuti dengan PHK, tanpa tumbuhnya investasi baru dalam sektor industri pengolahan. Sebenarnya pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan industri nasional maupun kebijakan berupa PP No 1/2007 yang sebelum dilaksanakan sudah direvisi. Hal inilah antara lain yang menimbulkan kesan belum adanya kebijakan industri, selain masalah kandungan kebijakan yang tak antisipatif, problem solving, dan memadai dukungan insentifnya.

Pada hal insentif yang memadai adalah merupakan kebijakan yang dapat diambil pemerintah dengan tujuan sebagai ransangan berkembangnya suatu industri.

Pemerintah mengusulkan 29 sektor industri mendapat insentif pajak penghasilan (PPh), yang dituangkan dalam revisi PP No 1/2007 tentang fasilitas PPh untuk bidang industri tertentu di daerah tertentu. Karakter industri harus bersifat pionir, mampu menyerap tenaga kerja, dan menyerap investasi dalam jumlah besar, serta sesuai dengan Kebijakan Industri Nasional (Kontan Kamis 24 Januari 2008, Insentif untuk 29 sektor industri). Perpres kebijakan pengembangan industri nasional (KPIN) tak mengatur jaminan suplai energi untuk industri nasional. KPIN memuat lima industri unggulan atau industri prioritas. Di antaranya adalah kelompok industri prioritas dengan basis industri manufaktur (perkilangan), pertanian, alat angkut, elektronika dan telematika, dan industri kecil dan kreatif. Industri ini menjadi perhatian pemerintah dan akan mendapat beragam insentif. Ada pula industri pionir dan industri prioritas tinggi yang menyerap banyak tenaga kerja dan ekspor tinggi. Kelompok ini juga akan mendapat insentif antara lain pembebasan bea masuk komponen dan bahan baku. Pembebasan pajak pertambahan nilai (VAT), serta pengurangan pajak penghasilan (PPh). Jika selama satu atau dua tahun setelah di-evaluasi tidak ada perkembangan akan dicabut insentifnya. Aturan tataruang, pembangunan industri agar berkumpul dalam satu kawasan. Pengusaha yang membangun pabrik di dekat sumber bahan bakar, otomatis akan mendapatkan insentif energi juga tidak diberikan. Insentif pemerintah untuk mendorong industri memperluas usaha

ke luar Jawa. Peraturan pelaksana ada lima yang berisi: road map masing-masing industri prioritas. (Kontan 6 Februari 2008).

Pertumbuhan industri 2007 hanya terealisasi 5,15%, jauh di bawah target yang dipatok oleh Departemen Perindustrian 6,31%. Realisasi itu juga jauh dibandingkan dengan Rencana Jangka Menengah Nasional 2004-2009. Acuan pembangunan itu mengamanatkan pertumbuhan sektor industri sebesar rata-rata 8,56% per tahun. Tiga dari sembilan cabang industri non-migas mengalami pertumbuhan justru minus. Yaitu industri tekstil (13,68%), barang kulit dan alas kaki (-2,82%) serta industri barang kayu dan hasil hutan (-1,74%). Sedangkan sektor yang cukup baik pertumbuhannya adalah industri alat angkut, mesin, dan peralatan (9,73%). Industri kertas dan barang cetakan 5,79%, serta industri pupuk, kimia, dan barang dari karet 5,69%. Akan tetapi menurut API (Asosiasi Perstektilan Indonesia) tekstil malah mengalami kenaikan sebesar 6,4% dari US\$9,4miliar pada tahun 2006 menjadi US\$10,06miliar tahun 2007. Penyebab tidak tercapainya target pertumbuhan menurut Menteri Perindustrian adalah akibat tekanan berat meningkatnya harga energi dunia, harga berbagai komoditas, dan dampak pasca krisis kredit perumahan 'subprime mortgage'

Selain itu koordinasi antar instansi yang berkaitan dengan industri belum berjalan. Karena bagaimanapun perkembangan industri tak bisa berdiri sendiri, sebab terkait dengan kebijakan di sektor lain, seperti ketersediaan bahan baku dan distribusinya, penyediaan sumberdaya manusia yang terampil dan terlatih. Tahun 2008 sasaran pertumbuhan di sektor industri sebesar

7,43%. Alasan ada di sektor industri alat angkut (9,6%) serta in-dustri makanan, minuman, dan tembakau (8%).

Sedangkan industri berskala kecil berupa kerajinan tangan dan kreatif serta in-dustri yang dilakukan di lingkungan rumah tangga dengan tenaga kerja sekitar 20 orang saja, masih jauh dari kebijakan yang bersifat perlindungan maupun insentif yang bermakna. Pada hal pasar ekspor sangat berminat seperti halnya hasil kerajinan tangan dari lidi Kontan 19 Nopember 2008). Berbagai produk kerajinan dengan bahan baku lidi diminati pembeli luar negeri. Pada hal di dalam negeri produk ini tak banyak peminatnya. Pe-nyebabnya ialah harga jualnya relatif mahal. Selain sapu lidi, bahan yang sama dibuat menjadi kerajinan tangan menarik seperti kotak 'compact disc', tempat tissues, stationary lidi, dll. Harganya Rp15.000 sampai Rp20.000 per unit, dan tempat sampah berharga Rp50.000. pedagang kerajinan tangan menjualnya dengan harga lebih dari 300% dari harga belinya. Pengimpor biasanya adalah 'showroom' khusus menjual barang kerajinan di Italia. Negara pengimpor lainnya ialah dari Australia, Jepang, Belanda, Jerman, dan nega-ra Eropa lainnya. Setiap bulan seorang pengusaha kerajinan lidi mampu mengeksport satu container ada juga yang mendapat pesanan sampai 14 container per bulan. Seorang pe-ngusaha kerajinan lidi mempunyai pengrajin 18 orang bisa menghasilkan lebih dari 3000 unit kerajinan tangan per bulan. Omsetnya rata-rata Rp200juta per bulan dengan marjin keuntungan sekitar 20%. Selain lidi, eceng gondok dan bambu juga merupakan bahan kerajinan tangan. Ciri khas yang disukai justru dengan rancangannya yang minimalis dan warna

coklat atau hitam, sehingga harganya juga tidak mahal.

Kebijakan Industri

Industri biasanya didefinisikan dengan merujuk kepada hasil utamanya yang seje-nis, seperti agroindustri, otomotif industri, industri perbankan, dll. Karena industri adalah kumpulan perusahaan yang menghasilkan barang homogen atau barang yang mempunyai sifat saling mengganti yang sangat erat. Dari segi pembentukan pendapatan, cenderung ber sifat makro, industri adalah kegiatan ekonomi yang menciptakan nilai tambah. Struktur pasarnya dapat terjadi dalam sektor jasa seperti perbankan, angkutan, sewa rumah, pari-wisata maupun produksi dengan struktur pasar barang industri pengolahan (manufacture). Secara mikro pengertian industri pengolahan lebih menekankan pada organisasi industri. Kajian tentang struktur-prilaku-kinerja industri termasuk ke dalam kajian organisasi in-dustri sebagai bagian kajian ekonomi industri (Hasibuan, 1993). Organisasi industri dika-itkan dengan pengaruh eksternal seperti adanya pembatasan perdagangan, kesempatan ker-ja, dan nilai tambah yang lebih merupakan makro. Pembicaraan organisai industri sendiri lebih menekankan pasar dan persaingan monopoli dan oligopoli dalam kaitannya dengan perilaku dan kinerja industri. Struktur pasar merupakan ukuran penting dalam mengamati perilaku dan kinerja industri, karena mempengaruhi keadaan persaingan dan tingkat har-ga barang maupun jasa. Dampaknya berujung kepada kesejahteraan masyarakat. Perilaku industri dalam suatu pasar merupakan tanggapan dan penyesuaian industri di suatu pasar dalam mencapai tujuannya, khususnya

tujuan perusahaan. Perilaku itu nampak dalam pe-nentuan harga, promosi, koordinasi kegiatan di pasar, dan juga dalam kebijaksanaan pro-duk. Kinerja industri adalah hasil kerja industri seperti kesempatan kerja, tingkat keuntungan, pertumbuhan industri, pemerataan pendapatan, dan kemajuan teknologi. Hal-hal itu merupakan gambaran terjadinya pengindutrian kegiatan ekonomi yang disebut dengan industrialisasi. Hal itu ditandai mulai dari cara memproduksi atau teknologi industrinya, konsentrasi industri, struktur industri, investasi, kesempatan kerja, penciptaan nilai tam-bah, harga, kebijakan industri, inflasi, perdagangan, serta keuntungan komparatif.

Industrialisasi pada hakikatnya ialah pembangunan perluasan kegiatan ekonomi yang terorganisir dengan maksud menghasilkan barang pabrik atau kilang secara massal. Industrialisasi mempunyai cirikhas oleh terjadinya transformasi dari suatu ekonomi pertanian primer menjadi suatu yang lebih terspesialisasi dan ekonomi padat modal. Secara mendasar ada dua aliran ideologi industrialisasi yang penting – terutama berkenaan de-ngan pemerintah – khususnya terkait dengan kebijakan industri. Pertama, aliran ekonomi ortodoks yang tidak rela pemerintah boleh dan mampu campurtangan sesuka hati dalam perekonomian. Milton Friedman (...) adalah ekonom ortodoks terke-muka, yang menen-tang campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Sedangkan kedua, ialah yang berpendapat pemerintah dapat dan mampu mengatur perekonomian melalui kebijakannya. Pendapat John Maynard Keynes (1936), Phillips (1958), Paul Samuelson dan Robert Solow (1960) bahwa pemerintah memiliki senjata ampuh untuk merangsang perekonomi-

an dengan berbagai kebijakan seperti ‘*tax rates*’, ‘*interest rates*’, dan ‘*public spending*’, seperti tindakan yang dilakukan banyak pemerintah ketika pere-konomian dalam depresi tahun 1929 dan 2008. Pemerintah juga sebenarnya dapat me-ngendalikan inflasi dan pe-ngangguran. Demikianlah halnya selama satu dasawarsa (1950-1960) kebijakan menga-tasi depresi itu memperlihatkan sosoknya di hampir seluruh dunia. Pemerintah memainkan peranan untuk merangsang dan menggerakkan ekonomi secara dinamis melalui kepu-tusan dan kebijakannya mempengaruhi perekonomian.

Kebijakan industri menyangkut kebijaksanaan yang berkaitan dengan upaya me-rubah secara berarti ketidakseimbangan antara industri suatu ekonomi dalam hal angka pengangguran dan tingkat pendapatan per kepala. Pendekatan utama yang diterapkan adalah menyebarkan kegiatan industri sekitar suatu daerah sehingga mampu terhindar pengangguran buruh dan sumber modal di suatu kawasan sementara penuh-sesak di dae-rah yang lebih makmur, seperti di Batam (Ahmad 2001). Kebijakan industri biasanya merupakan tindakan yang diambil oleh pemerintah. Serangkaian tindakan itu diambil untuk memajukan efisiensi industri, memajukan teknologi dan membuka peluang kerja. Kebija-kan industri diterapkan melalui intervensi terpilih mengenai tajaan kegiatan berkenaan dan dukungan pendanaan kepada industri, perusahaan dan proyek tertentu, dan melalui program antar-badan dirancang untuk membantu regenerasi dan perluasan industri yang direfleksikan dengan mengembangkan kawasan industri. Penekanan kebijakan industri secara khusus, teristimewa regenerasi kawasan yang telah jatuh ke

dalam penurunan in-dustri seperti halnya 'sunset' industri, perlu dibuat sehingga deindustrialisasi dapat dihindarkan. Bahkan dengan kebijakan industri itu, khususnya dengan menggalakkan perusahaan baru dan industri yang berkaitan (linkage industries) melalui ransangan atau insentif tertentu dapat tertarik merelokasi dan menanamkan modal di kawasan itu.

Di masa reformasi pemerintah baru menyiapkan strategi dan kebijakan pengembangan industri pada awal Oktober 2007, setelah munculnya dengan gencar kritikan dari kalangan pengusaha industri pada bulan juli 2007 sebelumnya. Menko Perekonomian Boediono menyatakan bahwa pemerintah tengah menyiapkan strategi pembangunan industri nasional yang akan merupakan integrasi berbagai kebijakan yang selama ini diterapkan pemerintah sehinggamenjadi strategi industri yang lebih besar dan sistematis. Hal itu masih dalam tahap konsep, masih ada masukan, tapi konsepnya sudah cukup lengkap (Analisa 5 Oktober 2007). Rapat koordinasi kebijakan itu dihadiri Menkeu (Sri Mulyani Indrawati), Menperindag (Mari E. Pangestu), Menteri ESDM (Purnomo Yus giantoro), Menteri Perindustrian (Fahmi Idris) dan Kepala BKPM (Muhammad Lutfi). Masih diperlukan 2 – 3 kali pertemuan lagi untuk menyelesaikan konsep yang menyatukan kebijakan yang di-anggap sudah berjalan menjadi suatu strategi besar yang sistematis sehingga satu sama lain tidak bertabrakan. Strategi pengembangan industri nasional itu menyangkut berbagai bidang mulai bahan bakunya sampai ke pemasaran. Pembahasan 'road map' industri nasional juga dilakukan di ting kat teknis, yang menjadi dasar untuk

penetapan kebijakan fiskal, termasuk berbagai insentifnya. Selama ini banyak sekali in-sentif fiskal diberikan secara ad-hoc saja. Pemerintah memberikan insentif ketika ada per-mintaan dari berbagai kalangan, terutama pelaku industri. Sebaiknya dengan road map yang jelas pemberian insentif pajak, pabean, anggaran, dan lainnya, basisnya kebijakan industri nasional, bukan ad-hoc. Penyusunan strategi pengembangan industri nasional harus selesai Oktober 2007, sesuai dengan Inpres No. 6 tahun 2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha kecil. Ada lima kelompok industri yang menjadi prioritas dalam strategi pengembangan industri nasional, yaitu in-dustri agro, alat angkut, elektronik dan telematika, beberapa industri manufaktur tertentu, dan beberapa industri menengah kecil tertentu. Target pertumbuhan industri dengan kebijakan itu rata-rata sekitar 8,6% per tahun seperti dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) (Harian Analisa 5 Oktober 2007). Akan tetapi kecenderungan perkembangan di dunia untuk menopang ekonominya, ialah industri yang mendayagunakan ilmu dan teknologi yang berbasis bioscience, energy, pangan, dan bahan sebagai penopang pertumbuhan ekonominya, di luar alat angkut, elektronik dan telematika yang di-nyatakan dalam Inpres No 6/2007 maupun RPJM. Dengan demikian kedua hal yang berkaitan dengan kebijakan industri itu – termasuk RPJM – memberi kesan tidak antiipatif dan tidak berancangan masa depan. Di antara teremasuk juga mengenai kebijakan industrialisasi nasional untuk daerah maupun kebijakan industrialisasi daerah sendiri (regional industrialization)

Untuk sebagian besar daerah di Eropa Utara, tekanan persaingan terhadap industri tempatan dalam bentuk lebih rendahnya subsidi dan atau pasar yang dibebaskan hampir akan dapat dipastikan bermakna kehilangan daya saing dan pada gilirannya juga kesempatan kerja dan upah. Kenyataannya pemerintah mencoba melindungi industri tempatan dalam berbagai cara agar dapat terjadi persaingan yang lebih rendah, akan tetapi ia juga menyelamatkan industri dan pekerjaan yang ada, yang pada akhirnya merupakan suatu tugas kunci pemerintah. Ternyata perlu diingat bahwa secara persis kebijakan seperti itu adalah penyebab utama keberhasilan industrialisasi negara bangsa. Ini juga, sesungguhnya penyebab bagaimana yang kaya semakin kaya, dari kebijakan merkantilis kota Italia dan negeri-negeri yang ada menjelang Renaissance sampai Irlandia dan Finlandia pada penghujung Abad 20. Oleh karena itu, pertanyaan para peneliti haruslah mempertanyakan tentang pembangunan selama masa 15 tahun adalah apakah kebijakan yang dijalankan oleh federal dan khususnya pada tingkat daerah sesungguhnya menciptakan upah yang lebih tinggi, kesempatan kerja yang lebih terbuka, dan ekspor yang meningkat atau tidak. Hanya dengan demikian seseorang akan tahu persaingan seperti apa atau kebijakan pe-ngayaan pasar yang bagaimana yang akan dijalankan, misalnya meningkatkan taraf mesin dan keterampilan, yang akan disarankan bila ada. Broadman (2006) misalnya, telah melakukan penelitian yang orisinal dan sangat menarik mengenai industri di daerah, dengan kesimpulan bahwa liberalisasi akan membawa persaingan dan juga inovasi. Akan tetapi bila dilihat dari masalah kejadian di Rusia sejak tahun 1989, nyatanya kebalikannya yang

justru terjadi (Broadman, Paas, Welfens 2006).

Dewasa ini di Riau belum diketahui adanya upaya membuat kebijakan industri seperti itu, terutama kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan industri yang menggunakan bahan baku hasil pertanian atau agroindustri sesuai dengan saran Master Plan Riau 2020 (2003). Hanya saja pada industri kecil seperti yang lazim ditemukan di kalangan agroindustri di kawasan pedesaan khususnya, pasarnya masih amat terbatas secara lokal sedang langganannya peranannya sebagai besar tidak memadai (Ahmad 2003). Sementara bergulat dengan keadaan itu, tak ada sama sekali kebijakan yang coba membantu memecahkan masalah yang dihadapi atau mencoba mengembangkannya. Malahan yang dilakukan justru memasukkan penanam modal perusahaan besar ke daerah pertanian, seperti yang terjadi dalam industri pengolahan ikan patin berbahan baku hasil budidaya patin, yang pada gilirannya mempunyai peluang besar mematikan industri pengolahan kecil yang ada di pedesaan Kampar. Akibatnya harga produk industri itu kurang dipengaruhi oleh mekanisme pasar, sehingga harga lebih ditentukan oleh perusahaan pengolahan yang besar (*buyer market*). Akan tetapi kritik terhadap pendekatan kebijakan industrialisasi ini ialah beralasan, bahwa 'memaksa' perusahaan berlokasi di suatu kawasan, yang mungkin tidak cocok bagi pemerintah untuk melindungi industri yang ada melalui subsidi. Karena kegiatan itu akan menyebabkan terganggunya efisiensi ekonomi. Namun, bagaimanapun juga, hanya sedikit bukti yang menunjukkan bahwa kebijakan seperti itu merupakan suatu hal yang serius diperjuangkan. Sebenarnya dari

kejadian di Kampar itu ada tiga masalah pokok berkaitan dengan kebijakan industri di Indonesia, yaitu masalah substansi kebijakan itu sendiri, kelembagaan yang bersifat koordinatif, serta tatanan pada tingkat penerapan kebijakan.

Perkembangan kebijakan industri sebenarnya melalui dua jalur, yaitu oleh inisiatif pemerintah secara makroekonomi di satu jalur dan strategi pengembangan perusahaan secara mikroekonomi. Akan tetapi, upaya ke arah koordinasi kebijakan pemerintah dan swasta seperti yang ideal itu amat jarang dilakukan di Indonesia, seperti tergambar dari perencanaan pembangunan ekonomi yang belum mewujudkan koordinasi keduanya (Ahmad 2009), maupun dari kenyataan belum selarasnya Kebijakan Industri Nasional yang disusun pemerintah, dengan *Road Map* yang diusulkan KADIN Indonesia dan Master Plan Indonesia 2030. Bahkan juga tidak ada koordinasi yang baik dengan perencanaan industrialisasi daerah, seperti Master Plan Riau 2020 yang disusun pada tahun 2002, karena pada waktu itu belum ada memang Rencana Jangka Menengah Nasional 2004-2009 maupun PP No 1 tahun 2007. Pada hal apabila kedua jalur pemerintah dan swasta ini dapat dipertemukan atau diselaraskan sebagai suatu kebijakan bersama, yang merupakan sintesa keduanya ataupun synergi sifatnya, maka peluang percepatan pembangunan industri menjadi lebih besar, seperti yang dialami negara Jepang, Korea Selatan, Taiwan dan Singapura.

Jepang misalnya pertama kali berkembang-biak perusahaan pada tahun 1880-an, yang menandai bermulanya industrialisasi yang didukung oleh didirikannya sekolah ke-

juruan dan niaga, dengan kebijakan terpusat secara khusus dibangun di kawasan kabupa- ten (*prefecture*). Ini merupakan satu di antara faktor yang memicu kemajuan pesat Indus-tri yang didukung oleh aspek nasionalisme dan ideologi yang tegas ke arah pembangunan ekonomi, melalui proses kebijakan penanaman modal dikoordinasikan, didukung oleh pembangunan dan penyiangan sumberdaya manusia yang diperlukan. Sebagai faktor pendorong utama industrialisasi itu ialah: (1) ideologi pengayaan nasional dipengaruhi tidak hanya oleh pusat geopolitik Jepang tetapi juga di daerah, di mana hal itu menyatakan diri sebagai suatu gabungan rasa nasionalis dan aspirasi pembangunan tempatan. 2) umumnya secara kentara tergambar berkembangnya perusahaan daerah muncul dari ini-siatif tempatan yang kuat dengan sengaja berusaha mengumpulkan dan mengembangkan sumberdaya manusia, sedangkan birokrasi tempatan dan orang yang berpengaruh selalu mengambil peran memandu. 3) keberhasilan menjalankan perusahaan di kawasan daerah didukung oleh dua faktor, yakni daerah yang bersangkutan sudah berumbuh secara sosial memiliki kompetensi untuk memajukan industrialisasi dan pengembnagan indsutri pede-saan sejak masa Tokugawa membuat mereka telah mahir secara wajar (Nakamura 2000). Jadi industrialisasi di Jepang dengan sadar merupakan suatu proses dalam pembangunan ekonomi, dengan koordinasi yang baik antara usahwan, birokrasi, dan pemimpin tempat-an, mulai dari hasrat memajukan industri, mengumpulkan modal, sampai kepada pembi-naan sumberdaya manusia. Suatu yang tak dijumpai hal itu dalam

industrialisasi di Indo-nesia dan di Riau. Hal itu dapat disimak bila ditinjau dari segi proses produksi dan tekno-logi serta modal yang dipakai pada galangan kapal di daerah Dumai dan Bengkalis (Ah-mad 1998; 2004), jelaslah belum tersentuh oleh industrialisasi yang bersifat kilang dan spesialisasi. Pembuatan kapal lebih bersifat kerajinan tangan dan suatu seni. Untuk per-cepatan transformasi dan kemudahan pembinaan yang bersifat dukungan dari kebijakan industri maka pembangunan kawasan industri adalah yang selalu dilakukan di beberapa negara industri, biasanya bekerjasama dengan universitas atau politeknik tempatan. Ke-bijakan industri menyangkut keputusan pemerintah yang bijak berkenaan dengan upaya transformasi ekonomi secara bermakna untuk mewujudkan keseimbangan antara sektor industri dengan sektor ekonomi lainnya, berkaitan dengan sumbangan sektor pada pere-konomian, kesempatan kerja dan pendapatan per kepala di suatu daerah. Oleh karena itu, kebijakan yang diawali dengan industrialisasi berazaskan pertanian dan berada di daerah atau bahkan kalau mungkin di pedesaan; yang bertujuan meningkatkan produktivitas, da-ya beli dan teknologi sektor pertanian, diikuti dengan pengembangan industri substitusi impor dan dorongan pasar dan ekspor secara pilihan atas dasar menciptakan kesempatan kerja dan perubahan struktur ekonomi.

Umumnya kebijakan industri diterapkan dengan tiga cara: 1) intervensi secara pi-lihan, termasuk rasionalisasi industri yang sedang menurun; mendukung pertumbuhan industri teknologi tinggi; mendukung perusahaan yang sedang kesulitan dana sementara; mendukung penemuan baru dan inovasi; mendukung penggabungan

strategis; 2) program umum termasuk mendukung usaha kecil yang baru mulai dan sedang berkembang; me-nyerap teknologi unggul; dan latihan kejuruan serta penciptaan pekerjaan; 3) sejumlah badan didirikan untuk menaja dan menyediakan bantuan dana di bidang ini, seperti badan penelitian dan pengembangan industri, badan perusahaan teknologi, dll. Tujuan utama su-atu kebijakan industri ialah untuk menjamin terjadinya industrialisasi dengan lancar. Ka-rena kebijakan industrinya sendiri belum jelas, maka tak heranlah kalau upaya mengoor-dinasi langkah penerapan kebijakan seperti yang dikemukakan di atas juga tak ada. Hal itu ada kaitannya dengan kompetensi pengelola pembangunan industri yang amat terbatas maupun perencana industrialisasi pemerintah yang tidak berkompeten pula. Sedangkan rencana industrialisasi yang sudah ada dalam Master Plan Riau 2020 tak dicermati pula .Akan tetapi juga dengan belum jelasnya kebijakan industrialisasi dapat pula dipandang sebagai kesempatan untuk merumuskannya bersama dalam suatu koordinasi kebijakan perencanaan yang melibatkan para pelaku industri, lembaga penelitian, dan pemerintah.

Kelembagaan

Kebijakan merupakan bagian dari kelembagaan. Karena ia akan mempengaruhi prilaku pemangku kepentingan yang berkaitan dengan keputusan yang dituangkan dalam kebijakan tersebut. Dalam perekonomian yang belum berkembang industrinya, kemajuan pembangunan umumnya mulai dari tindakan faktor luar seperti masuknya modal dan tek nik, permintaan pasar yang meningkat, adanya kemajuan yang bermakna dalam perdaga-ngan

(Furtado 1967). Sedangkan negeri yang sudah mencapai akumulasi modal yang tinggi tapi perekonomiannya sementara tetap (stagnant) seperti akibat dari depresi atau resesi, maka proses membangun bolehlah mulai dengan mendayagunakan faktor internal seperti intensifikasi pertumbuhan usahawan, inovasi teknologi, menemukan sumberdaya alam baru, dan kebijakan bidang industri maupun jasa diarahkan mengembangkan hal yang belum didayagunakan mendukung agar perekonomian berkembang. Karena dalam proses pembangunan seperti itu, penanaman modal kuat dipengaruhi oleh kelembagaan dan faktor yang menopang keberlanjutan industrialisasi itu.

Seperti diungkapkan oleh para sosiolog antara lain Max Weber (1904) yang menyangkut pengaruh berbagai bentuk semangat keagamaan terutama keyakinan penucian diri (puritanism) mengenai kebiasaan perilaku konsumen pada taraf awal capitalism. Sedangkan Thorstein Veblen (1904) seorang ekonom yang mengeritik ekonomi neoklasik dan penggagas aliran ekonomi kelembagaan, mengemukakan pandangannya tentang evolusi ilmu ekonomi dengan mengambil konsep kelembagaan dari anthropologi menyangkut kebiasaan, adat-istiadat, dan perilaku irihati (emulation) dan lain-lain, sebagai suatu sistem nilai-budayalah – yang di dalam cakupannya ekonomi berada – yang pada akhirnya memberi arah bagi ekonomi, jadi bukan sistem harga yang menentukan. Susunan politik dan sosial suatu negeri mungkin saja akan menghalangi atau merombak proses ekonomi yang normal. Karena itu Veblen yakin bahwa perlu dikenali dengan baik keterkaitan yang penting sosiologi, politik dan huku pada penyelesaian masalah ekonomi.

Sedangkan Myrdal (1967) menyatakan bahwa susunan kelembagaan meringtangi menyebarnya pengaruh industrialisasi dan juga menghalang inovasi. Pada hal seyogyanya susunan kelembagaan haruslah berdayaguna dalam pendekatan pembangunan, sebagai alat mewujudkan midernisasi yang ideal di antaranya dengan cara memperbaiki dan memajukan struktur kelembagaan itu sendiri. Dari sejarah, kebijakan penjajah suatu negara merupakan rintangan pada wujudnya industrialisasi. Sikap dan kelembagaan, khasnya kelembagaan politik kurang menyukai bermulanya industrialisasi. Dalam keadaan tak ada dukungan terhadap industrialisasi, suatu sistem sosial seyogyanya, sebagai hasil perubahan awal dan ineraksi seluruh keadaan apakah industrialisasi akan terhenti (stagnant), atau berkembang ke tingkat yang lebih tinggi, atau menurun ke tingkat yang lebih rendah Akan tetapi bila ada perencanaan, maka terbuka peluang sebagai suatu upaya koordinasi kebijakan untuk mencapai atau mempercepat pembangunan industri.

Kelembagaan (institution) pada dasarnya adalah alat manusiawi yang membuat dengan sengaja kendala terhadap susunan interaksi manusia. Mereka terbuat dari kendala resmi seperti peraturan, hukum dan undang-undang; kendala tak resmi seperti norma perilaku, persetujuan bersama, dan kode perilaku yang dibuat sendiri, erta cirikhas pemberdayaan kelembagaan tersebut. Kebijakan adalah suatu kelembagaan, yang akan mempengaruhi perilaku sasarannya, dalam melakukan kegiatan anggota masyarakat yang terlibat atau yang termasuk dalam lingkungannya. Jadi sebenarnya masyarakat hidup dalam bentuk dan dikuasai oleh kelembagaan tertentu. Kelembagaan itu dapat berupa

organisasi atau kaidah, baik formal maupun informal, yang mengatur perilaku dan tindakan anggota masyarakat baik dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam usahanya untuk mencapai tujuan tertentu (Mubyarto 1982). Bersamaan dengan itu dalam bentuk kebijakan dirumuskan susunan insentif kepada masyarakat khususnya yang bersifat ekonomi. Kelembagaan dan teknologi bekerja menentukan biaya transaksi dan transformasi yang terjadi yang dapat menambah biaya terhadap produksi.

Dalam industrialisasi di Indonesia hal itu sangat nyata akibat kebijakan yang diambil maupun akibat tidak adanya kebijakan industrialisasi yang jelas. Apalagi dalam pengambilan keputusan membuat suatu kebijakan industrialisasi, walaupun ada koordinasi pusat-daerah, pemerintah-usahawan swasta, usahawan swasta-masyarakat hampir tidak melembaga atau tidak merupakan suatu kelembagaan. Demikian pula untuk menjamin industrialisasi yang berkelanjutan dukungan R & D yang umumnya dimiliki oleh pemerintah belum diikutsertakan, sebab kesadaran internal perusahaan in-dustriupun mengenai penelitian dan pengembangan (R & D) itu juga tidak tumbuh. Sedangkan perusahaan multi-nasional mengembangkan kelembagaan R & D di negara asal perusahaan atau tidak akan dilakukannya di daerah yang jauh dari perguruan tinggi atau lembaga penelitian yang telah mempunyai nama dalam penelitian produk industri tertentu.

Kesimpulan

Kebijakan industrialisasi di Indonesia masih belum jelas, demikian pula perencanaan yang ada belum merupakan hasil interaktif dengan

pelaku atau penanam modal dalam bidang industri. Oleh sebab itu suatu kebijakan industri yang diawali dengan pertimbangan industrialisasi berazaskan pertanian dan dikembangkan di kawasan pedesaan atau di daerah, yang bertujuan meningkatkan produktivitas, daya beli dan teknologi sektor pertanian, diikuti dengan pengembangan industri substitusi impor dan dorongan pasar dan ekspor secara pilihan atas dasar menciptakan kesempatan kerja dan perubahan struktur ekonomi harus diikuti dengan koordinasi interaktif dengan pihak usahawan industri (pelaku industri maupun penanam modal dalam industri).

Melembagakan koordinasi industrialisasi dengan pihak swasta, lembaga penelitian dan perguruan tinggi merupakan keniscayaan keberlanjutan industrialisasi yang akan dikembangkan .

Kepustakaan

----- 1998. Manajemen Galangan Kapal Perikanan. Laporan Penelitian. Laboratorium

Kapal Perikanan, Fakultas Perikanan, Universitas Riau, Pekanbaru.

----- 2000. Industri Kecil Galangan Kapal Perikanan. Dalam Usaha-usaha Komersial di

Bidang Perikanan (Editor Feliatra). Pusat Penelitian Kawasan Pantai dan Perairan, Univ.

Riau. Pekanbaru: 1 – 16.

----- 2001. Sosial Ekonomi Industrialisasi Batam. Jurnal Industri dan Perkotaan

(JIP) V(11) Februari 2001: 68 – 75.

----- 2003. Pembuatan Kerupuk Ubi Sebagai Agroindustri Kecil di Dumai. JIP. Vol VIII

No. 13: 634 – 645.

----- 2004. Industrialisasi dalam Master Plan Riau 2020. *Jurnal Industri dan Perkotaan*

VIII(14) Agustus 2004: 758 – 765.

----- 2004a. Pengelolaan Galangan Kapal Skala Menengah di Dumai. *Jurnal Ilmu*

Administrasi “Publik & Bisnis” 2(2) September 2004: 120 – 128.

----- 2005. Aquaindustri Ikan Patin di Rumbio Kabupaten Kampar, Riau. *Jurnal*

Ilmu Administrasi “Publik & Bisnis” 2(2) Maret 2005: 120 – 128.

Ali, Anuar dan Rajah Rasiah 1996. *Perindustrian dan Pembangunan Ekonomi di Malaysia*.

Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. 208 hal.

Broadman, H.G., T. Paas, P.J.J. Welfens (Eds.), 2006. *Economic Liberalization and*

Integration Policy. Options for Eastern Europe and Russia, Springer, Berlin 358pp.

Chenery, H., S. Robinson, M. Syrquin 1988. *Industrialization and Growth, a Comparative*

Study. A World Bank Research Publication. Oxford Univ. Press. New York. 387h

Dervis, K., J. De Melo and S. Robinson 1982. *General Equilibrium Models for Develop-*

ment Policy/ Cambridge Univeersity Press, Cambridge, England.

Dian Prasomya Ratri. Duh, *Pertumbuhan Industri Terseok-seok*. Kontan 19 Februari 2008.

Furtado, Celso. 1967. *Development and Underdevelopment. A Structural View of the Problems*

of Developed & Underdeveloped Countries. University of Calkifornia Press. Berkeley.

Goh Keng Swee 1972, *The Economic of Modernization*. Asia Pacific Press, Singapura. 294 hal.

Harian Analisa 5 Oktober 2007. Medan. Menko Perekonomian Boediono:”Pemerintah Siapkan Strategi Pengembangan Industri. Hal 13.

Hasibuan, Nurimansjah. 1993. *Ekonomi Industri. Persaingan, Monopoli dan Regulasi*.

LP3ES. Jakarta. 323hal.

Heaton, Herbert 1957. *Industrial Revolution. In Encyclopedia of Social Sciences Vol VIII. The*

Macmillan Co.New York: 3 –13.

Keynes, John M.1936. *General Theory of Employment, Interest and Money*. Harcourt Brace and

Co. Inc. London.

Kontan 6 Februari 2008. Ternyata, Belum Ada Jaminan Pasokan Energi

Kontan 19 Nop 2008, hal 15: Pasar Ekspor Minati Kerajinan dari Lidi.

Kuznets, S. 1971. *Growth and Structural Shifts.” In W. Galenson, ed., Economic Growth and*

Structural Change in Taiwan: The Postwar Experience of the Republic of China. Cornell University Press, Ithaca, N.Y.

Lim Chong-Yah, Lee Sheng-Yi, Chia Siow-Yue. 1989. *Elements of Economic Theory*. Oxford

-
- University Press, Singapore. 527 hal.
- Mubyarto 1992. Pengantar Ekonomi Pertanian. LP3ES Jakarta,
- Myrdal, Gunnar 1967. Asian Drama. An Inquiry into the Poverty of Nations Vol. III. Pantheon, New York
- Nakamura, N. 2000. Meiji-era industrialization and provincial vitality: the significance of the first-enterprise boom of the 1880s. *Social Science Japan Journal* 3:187-205
- Phillips, AWH 1958. The Relationship between Unemployment and the Rate of Change of Money, Wages Rates in the United Kingdom 1861 – 1967. *Economica NS* Vol. XXV, November 1958: 283 – 299.
- Propinsi Riau. 2003. Master Plan Riau 2020.
- Syrquin H. dan M. Chenery (2002) Three Decades of Industrialization. wber.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/3/2/145
- Weber, Max. 1904. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism.